

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Toleransi Dalam Agama Islam

a. Pengertian Toleransi

Pada dasarnya setiap agama membawa kedamaian dan keselarasan hidup. Namun kenyataannya agama-agama yang tadinya berfungsi sebagai pemersatu tak jarang menjadi suatu unsur konflik. Hal tersebut disebabkan adanya *truth claim* atau klaim kebenaran pada setiap penganutnya. Padahal jika dipahami lebih mendalam kemajemukan diciptakan untuk membuat mereka saling mengenal, memahami, dan bekerjasama satu sama lain.¹⁶

Menurut Webster's New American Dictionary arti *tolerance* adalah *liberty toward the opinions of others, patience with others* yang kalau Toleransi antar umat Beragama diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya adalah memberi kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain.¹⁷

Yakni di era modern ketika manusia menemukan dirinya berada di depan suatu fakta mengkerutnya jagad berkat revolusi teknologi komunikasi dan informatika hingga menjadi unit kecil yang kini dikenal

¹⁶ Amirulloh Syarbini, dkk, *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Bandung: Quanta, 2011), hlm. 129- 130

¹⁷ Mohammad Ali Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: CV Wirabuana, 1986), hlm. 81

dengan “global village”, dan mereka harus hidup berdampingan dengan sesamanya yang datang dari berbagai latar belakang agama, budaya, suku dan tradisi. Prinsip tersebut adalah yang kemudian dikenal dengan istilah “toleransi”. Menurut Legenhausen dalam hal ini berkata: Toleransi agama yang sebenarnya hanya akan terwujud ketika manusia belajar menghargai keyakinan-keyakinan agama yang mereka anggap sebagai salah. Kunci untuk toleransi bukanlah membuang atau merelativisasi ketidaksepakatan, tapi kemauan untuk menerima ketidaksepakatan yang *genuine*.¹⁸

Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain, tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya melainkan harus tercermin sikap yang kuat atau istiqamah untuk memegang keyakinan atau pendapatnya sendiri. Dengan adanya toleransi maka akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan. Hubungan antar umat beragama didasarkan pada prinsip persaudaraan yang baik, bekerjasama untuk menghadapi musuh dan membela golongan yang menderita.¹⁹

Prinsip mengenai toleransi antar umat beragama yaitu: (1) tidak boleh ada paksaan dalam beragama baik paksaan itu berupa halus maupun

¹⁸ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 211-213

¹⁹ Lely Nisvilyah, *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)*, (Surabaya: Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 2, 2013), hlm. 3

dilakukan secara kasar; (2) manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinan itu; (3) tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu ; dan (4) Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sefaham atau tidak seagama, dengan harapan menghindari sikap saling bermusuhan.²⁰

b. Pengertian Pluralisme Yang Mempunyai Arti Sama dengan Toleransi

Pluralisme adalah suatu sikap yang mengakui dan sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak itu. Pluralisme di sini dapat pula berarti kebijakan atau politik yang mendukung pemeliharaan kelompok-kelompok yang berbeda-beda asal etnik, pola budaya, agama dan seterusnya.²¹

Dalam konteks teologi agama-agama, pluralisme mengacu kepada teori atau sikap bahwa semua agama, meskipun dengan jalan masing-masing yang berbeda, mengacu pada tujuan yang sama: *Yang Absolut, Yang Terakhir, Yang Holygius*.²² Dalam pandangan pluralisme, kebenaran tidak hanya didasarkan kriteria logika tetapi juga kriteria kebenaran lainnya. Menurut pandangan Leibniz dan Russel ini menolak kriteria kebenaran monisme yang dikutip oleh Fannani dan dikutip kembali oleh Umi Sumbulah dalam *Analisa Journal of Social Science and*

²⁰ Mohammad Ali Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu...*, hlm. 82

²¹ Kautsar Azhari Noer, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2005), hlm. 218

²² *Ibid*, hlm. 219

Religion. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pluralisme dinilai dapat menjawab permasalahan dengan banyak alternatif penyelesaian. Pluralisme agama diartikan sebagai pandangan dan sikap bahwa hakikat agama tidak hanya satu tetapi banyak dan beragam. Dengan demikian, pluralisme agama dapat diartikan sebagai suatu teori yang merujuk pada hubungan antara berbagai tradisi agama, perbedaan dan klaim-klaim kompetisinya.²³

Dalam jurnal milik Umi Sumbulah Armstrong mengilustrasikan bahwa agama-agama besar di dunia memiliki konsepsi yang beragam tentang Tuhan. Pemahaman tentang pluralisme dapat membantu umat beragama dalam membangun dialog menuju keharmonisan dan kerukunan berdasarkan nilai ketuhanan.²⁴

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat beragama di Indonesia mencakup tiga dimensi, yakni: kerukunan inter-umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap umat beragama, untuk membangun

²³ Umi Sumbulah, *Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Di Kota Malang*, (Malang: *Analisa Journal of Social Science and Religion* Volume 22, No. 01, 2015), hlm. 2 diakses pada tanggal 6 Desember 2016 pada pukul 17.30 WIB

²⁴ *Ibid*, hlm. 2

kerukunan dan keharmonisan. Dalam mewujudkan trilogi kerukunan, diterbitkan regulasi dan perundangundangan, serta intensifikasi dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah hubungan umat beragama.²⁵

Dari jurnal yang ditulis oleh Umi Sumbulah ditemukan beberapa pendapat dari para Elite agama yang ada di kota Malang. Elite Islam NU, Gus Shampton (*wawancara*, 23-6-2014), menegaskan bahwa pluralisme memiliki arti adanya saling menghargai, namun menolak anggapan bahwa semua agama benar adanya. Kepala KUA Lowokwaru ini juga menyangkal bahwa Gus Dur yang dinilai banyak kalangan sebagai ulama dan pemikir liberal itu telah mengajarkan persamaan semua agama. Baginya Gus Dur tidak pernah mengajarkan bahwa semua agama itu sama, sebagaimana terlihat dalam konsep *lakum dīnukum waliya dīn* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).²⁶

Elite Islam dari Muhammadiyah, Agus Purwadyo, membedakan makna pluralisme dengan pluralitas. Ia menganggap pluralitas agama sebagai realitas sosial, yang memungkinkan pengakuan terhadap enam kelompok agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Mereka beribadah sesuai keyakinan masing-masing, tanpa hak bagi satu kelompok untuk mengganggu dan menghalangi kelompok lain, minoritas menghormati mayoritas dan mayoritas melindungi minoritas, hidup dalam penghormatan dan penghargaan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2

²⁶ *Ibid*, hlm. 3

Elite Kristiani, Pdt Kusumo Rahardjo, berpandangan bahwa pluralisme adalah menerima kebenaran agama lain. Dalam konteks ini maksudnya adalah bahwa semua agama memiliki ajaran yang benar, semua harus mengasihi dan tidak merasa benar sendiri. Pdt Budiono berpendapat pluralisme adalah paham sekuler yang memandang semua agama sama, misalnya pemahaman tentang Tuhan, meski semua mengakui satu Tuhan tetapi penafsiran dan pemahaman manusia tentang Tuhan berbeda-beda.²⁷

Romo Felix Suyatno memandang pluralisme agama sebagai kenyataan adanya banyak agama. Pdt. Nugraha menyatakan bahwa pluralisme agama melahirkan pandangan yang beragam tentang Tuhan dan cara menyembahnya sesuai dengan keimanan masing-masing. Seseorang yang beragama Katolik akan menyembah Tuhan sebagaimana keyakinan iman Katolik, meskipun sebenarnya Tuhan bukanlah Katolik.

Romo Felix juga menegaskan bahwa pluralisme agama, khususnya Islam, Kristen dan Yahudi berasal dari rumpun yang sama, dari Nabi Ibrahim. Agama-agama Ibrahim memiliki dua keterpautan, yakni: **pertama**, secara *genealogies* berasal dari keturunan yang sama, yakni Ibrahim dari jalur Ishaq untuk Kristen dan Yahudi, dan keturunan Ibrahim dari jalur Ismail bagi Islam; **kedua**, ketiganya juga memiliki keterpautan teologis karena memiliki kesamaan ajaran, monoteisme. Posisi dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 3

kesinambungan risalah Islam dengan agama-agama sebelumnya ini dikukuhkan dalam al-Qur'an, 33:7, 40:78 dan 33:40.²⁸

Pandangan elite Hindu tentang pluralisme diperoleh dalam wawancara dengan Suwardika, bahwa perbedaan adalah absah sebagaimana keragaman dalam agama Hindu. Agung memandang pluralitas sebagai manifestasi dari *vibhuti* (kemahakuasaan) Hyang Widhi. Di balik bermacam-macam maya di jagad raya, ada realitas yang bersumber dan bermuara. Dalam konteks ini, umat Hindu dituntut mampu memberikan penghargaan, karena pluralitas adalah suatu kenyataan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Elite Budha, Bhiku Khantidaro menyatakan bahwa semua agama memiliki tujuan sama, yakni mengajak umatnya menjadi orang baik, menghindari kejahatan dan keburukan. Dengan demikian, semua agama mempunyai tujuan yang sama, namun menempuh jalan yang berbeda-beda. Jika ingin mencapai tujuan yang sama, atau mencapai hidup yang bahagia maka semua umat beragama harus saling membantu dan menolong sesuai kemampuan masing-masing.

Menurut Vimalaseno pluralisme adalah kemampuan memahami perbedaan sehingga menerima agama lain. Tejaseno memandang pluralisme sebagai keberagaman. Dengan perbedaan setiap agama, maka dituntut bisa menerima dan saling tenggang rasa. Menurutnya inti pluralisme adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Ratanajayo

²⁸ *Ibid*, hlm. 4

berpandangan bahwa pluralisme berarti mengakui kebenaran agama sendiri dan menerima kebenaran agama lain.²⁹

Dengan paham pluralisme, umat beragama akan bisa bersifat inklusif dan pluralis, karena menghormati fakta keberbagaian, dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri, dan tidak harus menganggap bahwa semua keyakinan adalah sama. Salah satu hak asasi manusia ialah mengakui hak orang lain untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan mengakui hak pemeluk agama tersebut untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.³⁰

Kerukunan beragama bukan berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 4

³⁰ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 38-39

³¹ Toto Suryana, *Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama* (Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Volume. 9, No. 2 Tahun. 2011) hlm. 133 diakses pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 18.21

Dalam konteks kehidupan yang sarat dengan pluralitas-multikultural, dibutuhkan pendekatan yang kompatibel dalam memahami agama. Dengan pendekatan yang semacam ini, diharapkan akan lahir paradigma keberagamaan yang inklusif. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pendekatan teologis-dialogis, yaitu metode pendekatan agama melalui dialog nilai-nilai normatif masing-masing aliran atau agama. Dalam proses dialog, dibutuhkan keterbukaan antara satu sama lain, agar tumbuh saling pengertian dan pemahaman.³²

c. Landasan Toleransi atau Pluralisme dalam Agama Islam

Hal ini sama dengan beberapa prinsip etika dalam al-Qur'an dalam hubungan sosial antar umat beragama adalah: *Pertama*, egalitarianisme (*al-musawat*), yang memandang manusia ditakdirkan sama derajatnya. Ayat yang dirujuk untuk prinsip ini adalah QS 49:13. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa harkat dan martabat manusia ditentukan oleh kualitas ke-*taqwa*-annya.³³

Kedua, prinsip keadilan (*al-adalat*). Prinsip ini pada dasarnya merupakan implikasi dari ber-*taqwa*. Ide tentang keadilan merupakan prinsip dasar untuk memperlakukan orang lain agama secara sama, adil dan tidak diskriminatif, baik dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, politik, sosial-budaya dan pendidikan, maupun dalam penerapan hukum.³⁴

³² Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27

³³ Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme, Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama*, (Jakarta: RM Books and PSAP, 2007), hlm. 173

³⁴ *Ibid*, hlm. 177-179

Ketiga, prinsip toleransi (*tasamuh*) dan kompetisi dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*). Toleransi adalah sikap sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Akar-akar toleransi yang dirujuk dari teks kitab suci al-Qur'an memiliki beberapa prinsip: (a) perbedaan(keragaman) keyakinan adalah kehendak Allah yang bersifat perennial; (b) bahwa pengadilan dan hukuman bagi keyakinan yang salah harus diserahkan kepada Allah sendiri. Tuhan lebih tahu siapa yang menyimpang dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan petunjuk; (c) keyakinan kepada sebuah agama fitrah. Agama fitrah tidak hanya bermakna agama Islam, tetapi juga bermakna agama asal-usul umat manusia, yang melekat, dan dicapkan secara tak terhapuskan pada jiwa manusia.³⁵

Keempat, prinsip saling menghormati, kerjasama, dan pertemanan. Prinsip ini merupakan implikasi sosiologis ketiga prinsip sebelumnya. Prinsip ini sangat ditekankan dalam al-Qur'an karena dipandang sama dengan menghormati agama sendiri. Sebaliknya, mencaci agama lain sama dengan mencaci agama sendiri.³⁶

Kelima, prinsip ko-ekstensi damai (*al-ta'ayusy al-silmi*). Prinsip ini merupakan dasar hubungan antar manusia sesuai dengan generik Islam itu

³⁵ *Ibid*, hlm. 180-185

³⁶ *Ibid*, hlm. 189

sendiri, yaitu damai. Oleh karena itu, menerima Islam sebagai agama, konsekwensinya menerima ko-ekstensi damai sebagai ajaran pokok.³⁷

Keenam, dialog yang arif-konstruktif-transformatif (*mujadalat bi al-hasan*). Ini merupakan konsekwensi dari prinsip kelima. Dalam implementasinya, sepuluh pedoman dasar dialog antar agama dari Leonard Swidler dapat dijadikan penafsiran yang baik berkenaan dengan dialog *bi al-lati hiya ahsan*. Kesepuluh dasar dialog tersebut adalah; (1) bahwa tujuan awal proses dialog adalah untuk berubah, dan tumbuh dalam persepsi yang benar kenyataan dan seelanjutnya bertindak secara tepat; (2) dialog harus merupakan proyek dua sisi: pertama, dialog dalam komunitasnya sendiri, dan selanjutnya bertindak secara tepat, dan selanjutnya dialog dengan komunitas lain; (3) setiap partisipan yang memasuki proses dialog ini harus mempercayai ketulusan dan kejujuran rekan dialognya; (4) dalam dialog tidak boleh melakukan perbandingan atas ideal-ideal agama kita dengan ideal-ideal agama partner dialog kita; (5) setiap partisipan dialog harus bisa mendefinisikan dirinya sendiri sebab dalam kenyataannya suatu agama hanya bisa didefinisikan oleh agama oleh agama itu sendiri sebaliknya setiap definisi diri yang ditafsirkan oleh partner dialog kita harus dapat menerima dengan lapang dada, sebagai upaya untuk mengenal diri lebih baik; (6) masing-masing partisipan dialog harus bisa menahan diri justru untuk mencari pokok-pokok perbedaan yang ada; (7) dialog hanya bisa menjadi *parcum pari*, yaitu antara pihak

³⁷ *Ibid*, hlm. 196

selevel; (8) proses dialog ini hanya bisa berlangsung melalui basisi saling percaya; (9) setiap pribadi yang terlibat dalam dialog harus bisa mengambil sikap kritis, minimal atas dirinya sendiri (gagasan-gagasannya) dan tradisi religius yang diyakininya; (10) setiap partisipan harus berusaha memahami agama dari partner dialognya “dari dalam”.³⁸

Salah seorang intelektual yang banyak mengembangkan model pendekatan ini adalah W. Montgomery Watt. Menurut Watt, dialog merupakan upaya saling mengubah pandangan antara penganut agama yang saling terbuka dan belajar satu sama lain. Dalam hal ini, Watt bermaksud menghilangkan sikap merendahkan agama seseorang oleh penganut agama lain, serta menghilangkan ajaran yang bersifat apologi dari masing-masing agama. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar pemeluk agama. Langkah pertama bagi terciptanya kerjasama adalah kedua pihak dituntut untuk bersama-sama mengoreksi citra dan kesan yang keliru yang selama ini tergambar dalam benak masing-masing pemeluk agama.³⁹

Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidak adanya

³⁸ *Ibid*, hlm. 199-200

³⁹ Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, hlm. 27

paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain.⁴⁰

Pluralitas merupakan hukum ilahi dan sunnah ilahiyah yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama makhluk Allah pada level *syari'at*, *way of life*, dan peradaban, semua bersifat plural. Pluralitas merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah swt dalam setiap ciptaan-Nya. Pluralitas yang menyangkut agama yaitu toleransi beragama berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragama dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima kelainan yang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan.⁴¹

Keutamaan sikap peduli terhadap orang lain yang berbeda suku dan agama bukan berarti harus mengikuti adat istiadat atau keyakinan serta agama mereka, tetapi dijadikan suatu kekayaan kebudayaan Indonesia yang harus dihormati karena Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap individu untuk melaksanakan ajaran dan keyakinan mereka, dengan kata lain dengan jabaran dari UUD 45, pasal 29 ayat 2, yaitu: (a) Meyakini dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, (b) Membina adanya saling menghargai

⁴⁰ Amirulloh, *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, hlm. 111-113

⁴¹ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 206-207

dan menghormati antar pemeluk agama, (c) Tidak saling menghina, melecehkan, mengejek penganut agama lain apalagi menyakiti atau menyiksa dengan cara-cara keji dan tidak berkeprimanusiaan.⁴²

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang adanya keberagaman dalam beragama, dan dari keberagaman itu Islam mempersilahkan menganut agama masing-masing dan tidak boleh memaksakan kepada orang lain untuk memeluk agamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. [162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.⁴³

Keberagaman dan kebinekaan agama adalah realita yang ada di Indonesia karena masyarakat di Indonesia memiliki umat yang berbeda agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha yang dijadikan agama resmi dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Adanya kepedulian terhadap keberagaman di Indonesia mempunyai tujuan untuk saling mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerjasama dalam

⁴² Soemanto, et. all., (ed.), *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*, (Jakarta: PT PENA CITASATRIA, 2008), hlm. 19-20

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 59

lingkup “*Hablum Minannas*” dengan pemeluk-pemeluk agama lain agar tercipta kerukunan dan suasana yang kondusif, saling membantu mengatasi masalah-masalah yang dibutuhkan dalam masyarakat.⁴⁴

Bagi umat Islam merusak bangunan tempat ibadah agama lain, menghina dan mencaci ajaran serta tatacara ibadah mereka sangat dilarang, Allah SWT telah menegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: “untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”⁴⁵

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan paling sempurna, manusia diberikan akal dan pikiran untuk membedakan yang benar dan yang salah dan manusia juga diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan kelak mempertanggung jawabkan pilihannya itu. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi umat Islam untuk menjelek-jelekkkan agama lain. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 139:

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ
أَعْمَلُكُمْ وَخَنَّا لَهُ مَخْلُصُونَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan Kami tentang Allah, Padahal Dia adalah Tuhan Kami dan Tuhan kamu; bagi Kami amalan Kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya Kami mengikhlaskan hati".⁴⁶

⁴⁴ Soemanto, et. all., (ed.), *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan...*, hlm.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 1089

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 31

Secara tegas dalam surat ini, silahkan kamu mengamalkan amalan dan keyakinan kamu dan kami akan mengamalkan amalan dan keyakinan kami dengan sepenuh hati dan ketulusan.⁴⁷

Menurut Prof. Al-Qaradhawi dalam Anis Malik Thoha menyebutkan empat faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku orang Islam terhadap non-Muslim.⁴⁸

1) Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kesukuannya. Kemuliaan mengimplikasikan hak untuk dihormati. Dari Hadits Nabi SAW yang artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a: Jenazah (yang diusung ke pemakaman) lewat dihadapan kami. Nabi Muhammad Saw berdiri dan kami pun berdiri. Kami berkata, “Ya Rasulullah ini jenazah orang Yahudi” Ia berkata,” Kapanpun kalian melihat jenazah (yang diusung ke pemakaman), berdirilah.”⁴⁹

Dari Hadits tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan, sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Jadi sudah jelas, bahwa sisi aqidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan SWT dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermu’amalah dari sisi kemanusiaan kita.

2) Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah swt yang telah memberi

⁴⁷ Murhanudin, *Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Bewawasan Kerukunan*, (Jakarta: Puslitbang Penda, 2007), hlm. 14-16

⁴⁸ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, hlm. 215

⁴⁹ Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 267

mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Kehendak Allah pasti terjadi, dan tentu menyimpan hikmah yang luar biasa. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memaksa untuk Islam. Allah berfirman dalam sebuah ayat di surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ
 النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: "Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"⁵⁰

Ayat di atas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Seperti dicontohkan, kaum Yunus yang tadinya enggan beriman, dengan kasih sayang Allah swt. memperingatkan dan mengancam mereka. Hingga kemudian kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak mereka sendiri pula mereka sadar dan beriman.⁵¹

- 3) Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka di hari perhitungan nanti. Dengan demikian hati seorang muslim menjadi tenang, tidak perlu terjadi konflik batin antara kewajiban berbuat baik dan adil kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, harus berpegang teguh pada kebenaran keyakinan sendiri.

Allah swt. berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29:

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 314

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 1, vol 6. hlm. 164

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ^ع إِنَّا
 أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا^ع مِنْ سُرَادِقُهَا^ع وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي^ع الْوُجُوهَ^ع بِئْسَ^ع الشَّرَابُ^ع وَسَاءَتْ^ع مُرْتَفَقًا^ع

Artinya: “Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”⁵²

Ayat ini diturunkan untuk memerintahkan Rasul saw.

Menegaskan kepada semua kaum termasuk kaum musyrikin bahwa :

“*dan katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: “kebenaran, yakni wahyu Ilahi yang aku sampaikan ini datanganya dari Tuhan pemelihara kamu dalam segala hal; maka barang siapa di antara kamu, atau selain kamu yang ingin beriman tentang apa yang kusampaikan ini maka hendaklah ia beriman, keuntungan dan manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri, dan barang siapa di antara kamu atau selain kamu yang ingin kafir dan menolak pesan-pesan Allah, maka biarlah ia kafir, walau sekaya dan setinggi apapun kedudukan sosialnya. Tidaklah aku apalagi Allah swt akan mengalami sedikit kerugian pun dengan kekafirannya, sebaliknya, dialah sendiri yang akan merugi dan celaka dengan perbuatannya yang telah menganiaya dirinya sendiri.*”⁵³

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.440

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 1, vol 8. hlm. 52

- 4) Keyakinan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Begitu juga Allah swt. mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Seperti firman Allah swt. dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اٰلًا بِمَا تَعَدَلُوْا ۗ اَعَدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁴

Dalam ayat tersebut Allah melarang ummatnya menebar permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum yang yang dapat mendorong terhadap sikap tidak adil terhadap kaum tersebut. Jadi terhadap merekapun kita harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka patut menerimanya. Karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan dari pada berlaku aniaya dan berat sebelah keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, dan di atas rasa cinta dan permusuhan, apapun sebabnya.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 155

⁵⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Thoha Putra, 1993) Vol VI hlm. 129

Beberapa ayat Al-Qur'an di atas menerangkan ungkapan yang sangat tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. Bahkan menurut Sayyid Quthb, kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang nomor satu yang tanpanya manusia bukan lagi manusia.⁵⁶

Hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Di tengah masyarakat yang heterogen, yang diwarnai ketegangan-ketegangan konflik, nabi melakukan gerakan besar yang berpengaruh bagi kesatuan *ummah*. *Pertama*, Hijrah, implikasi sosialnya terletak pada persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Bukan persaudaraan biasa, kaum Anshar melapangkan kekayaannya untuk dapat dinikmati pula oleh kaum Muhajirin. *Kedua*, piagam Madinah, ketegangan antara Yahudi dan Muslim, baik Anshar maupun Muhajirin, begitu pula antar kelompok lain dan juga kemajemukan komunitas Madinah membuat Nabi melakukan negosiasi dan konsolidasi melalui perjanjian tertulis yang kemudian familiar disebut Piagam Madinah. Konstitusi ditanda tangani oleh seluruh komponen yang ada di Madinah yang meliputi Nasrani, Yahudi, Muslim dan 19 Musyrikin. Dalam 47 pasal yang termuat di dalamnya statement yang diangkat meliputi masalah *monotheisme*, persatuan kesatuan, persamaan hak, keadilan kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat perdamaian dan proteksi. Konstitusi tersebut memberi tauladan kita

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Fi Dzilal Al-Qur'an* terj, As" ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet, 1, hlm. 343

tentang pembentukan *ummah*, menghargai hak asasi manusia dan agama lain, persatuan segenap warga negara, dan yang terpenting adalah tanggung jawab menciptakan kedamaian.⁵⁷

Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat manusia secara universal, dengan tidak mengenal suku, adat, budaya, dan agama. Akan tetapi yang dilarang Islam hanya pada konsep aqidah dan ibadah. Kedua konsep tersebut yang tidak bisa dicampuri oleh umat non Islam. Namun aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dan kerjasama yang baik.

Perlu ditambahkan bahwa mengakui eksistensi praktis agama-agama lain yang beragam dan saling berseberangan ini, dalam pandangan Islam tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya. Melainkan menerima kehendak ontologis Allah swt dalam menciptakan agama-agama berbeda-beda dan beragam.⁵⁸

Mengakui realitas perbedaan dan hak seorang untuk berbeda sama sekali tidak berarti syari'at dakwah mesti digugurkan. Bahkan sebaliknya, justru malah semakin menegaskan urgensi dan pentingnya dakwah. Sebab di satu pihak, hakikat perbedaan itu sendiri sejatinya memungkinkan masing-masing faksi yang saling berbeda untuk melihat dirinya sebagai entitas yang memiliki kelebihan, nilai dan kebenaran, dan untuk melaksanakan hak-haknya, serta untuk mengekspresikan jati dirinya secara

⁵⁷ Hijriyah Hamuza, "*Mencermati Makna Ajaran Muhammad Solusi Problem Ummah Masa Kini*", (Jurnal Edukasi, vol. VI, No 1, Juni 2009), hlm 36 diakses pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 12.50 WIB

⁵⁸ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama....*, hlm. 215

bebas sebagai upaya mewujudkan kelebihan, nilai dan kebenaran yang dimilikinya.⁵⁹

Setiap umat Islam meyakini, bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Islam juga mengakui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw serta agama-agama yang diturunkan melalui nabi-nabi itu. Keberagaman agama, dengan demikian, merupakan keadaan yang hadir disaat kehadiran Islam itu sendiri. Karena itu, di dalam Islam, adanya keberagaman agama dan golongan telah jelas dan tegas diatur, bahkan di dalam al-Qur'an.⁶⁰

Didalam Surat Annisa ayat 36 Allah SWT berfirman:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا ۗ فَخُورًا﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

[294] Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

[295] Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 216

⁶⁰ Sulastomo, (ed.), *Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama: Agama Dan Budaya Perdamaian Dalam Masyarakat Islam*, (Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), hlm. 116-117

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 119

Dari ayat ini jelas, bahwa perintah untuk berbuat kebaikan dalam ajaran Islam mempunyai cakupan yang luas, tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan tali darah atau se-agama saja. Tetapi dengan siapa saja, dari berbagai bangsa dan agama.⁶²

Demikianlah, melalui budi pekerti yang luhur itu, niscaya umat Islam akan memberi manfaat bagi lingkungannya, bagi tetangganya dan bagi seluruh umat manusia. Kehadiran Islam, dengan demikian merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, “ Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia”. Manusia berbudi luhur, niscaya akan dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di sekitarnya, tanpa memandang identitasnya. Islam tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat yang lain, melalui sikap umatnya yang berbudi luhur itu. Prinsip non-diskriminatif dalam Islam ini, sudah tentu akan mampu membangun masyarakat yang damai, oleh karena segala perbedaan yang ada pada umat manusia, dalam pandangan Islam, merupakan rahmat dari Allah SWT sebagaimana dikemukakan pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad.⁶³

Dengan perkataan yang lain, setiap umat Islam, dengan demikian harus mampu hidup di dalam masyarakat yang “ plural”, oleh karena “pluralisme” merupakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Islam telah dengan jelas memberikan petunjuk untuk hidup di

⁶² Sulastomo, (ed.), *Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama...*, hlm. 120

⁶³ *Ibid*, hlm 120-121

masyarakat yang plural itu. Umat Islam, dengan demikian harus selalu bersikap “inklusif” dan bukan “eksklusif”. Sikap seperti inilah yang sebenarnya sangat diperlukan di dalam masyarakat yang majemuk (plural). Kalau sikap seperti itu juga berakar dari ajaran agama, maka akan memiliki landasan yang kuat didalam membentuk masyarakat yang damai.⁶⁴

2. Pendidikan Toleransi

a. Pengertian Pendidikan Toleransi

Kemanusiaan adalah nilai-nilai objektif yang dibatasi oleh kultur tertentu, nilai kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di atas fondasi demokrasi.⁶⁵ Antara pendidikan demokratis dan pendidikan pluralis-multikultural merupakan sebuah rangkaian. Masing-masing saling bergantung dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu membangun pendidikan yang berparadigma pluralis –multikultural merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan paradigma semacam ini, pendidikan diharapkan akan melahirkan anak didik yang memiliki cakrawala pandang yang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, dan penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan.⁶⁶

Sebagaimana diatur dalam konstitusi, negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijaksanaan. Dalam konteks kajian ini, maka

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 121

⁶⁵ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996) , hlm. 26-27

⁶⁶ Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2008), hlm. 49

ruanglingkup kewenangan tersebut mencakup kebijaksanaan agama, pendidikan, dan politik. Dalam hal ini, pendidikan agama dipahami sebagai sub sistem kebijaksanaan pendidikan (posisi ini secara eksplisit dituangkan di dalam Bab X pasal 36-37 UU Sisdiknas dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang berada di antara kebijaksanaan agama dan kebijaksanaan politik. Dalam arti, pendidikan agama berperan sebagai pelayan agama dengan memanfaatkan teori-teori pendidikan. Demi eksistensinya di suatu negara, pendidikan agama memerlukan dukungan kebijaksanaan agama, kebijaksanaan pendidikan, dan kebijaksanaan politik dari negara. Rumusan kebijaksanaan agama tersebut dituangkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), seperti misalnya GBHN tahun 1999-2004.⁶⁷

Sikap pluralis dan toleran semacam inilah yang seharusnya ditumbuh kembangkan lewat berbagai macam institusi yang ada termasuk lewat jalur pendidikan. Berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kurikulum dikembangkan salah satunya dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa

⁶⁷ M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 24

membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.⁶⁸

Menurut Frans Magnis Suseno, pendidikan pluralisme adalah suatu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang lebih luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga kita mampu melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan dan solidaritas.⁶⁹

Terminologi pendidikan pluralis-multikulturalis memang relatif belum banyak dikenal luas oleh publik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat konsepsi dan signifikasinya dalam konteks masyarakat Indonesia baru menemukan momentumnya dalam beberapa tahun belakangan seiring munculnya berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan realitas masyarakat Indonesia yang pluralis-multikultural. Apalagi kenyataan gaung dan peran pendidikan pluralis-multikultural, sebagaimana dinyatakan oleh Ainurrafiq Dawam, kurang begitu meyakinkan bagi masyarakat yang seharusnya mengapresiasi secara maksimal terhadap diskursus ini. Masyarakat yang harus mengapresiasi pendidikan multikultural adalah masyarakat yang secara obyektif memiliki anggota yang heterogen dan pluralis. Paling tidak heterogenitas dan

⁶⁸ Selviyanti Kaawoan, *Jurnal Pendidikan Islam: Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Perilaku Toleran Pada Warga Sekolah*, (IAIN Sultan Amai Gorontalo:TADBIR, 2014), hlm.73 diakses pada tanggal 06 Desember 2016 pada pukul 17.30 WIB

⁶⁹ Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam Keragaman....*, hlm. 218

pluralitas anggotanya bisa dilihat dari eksistensi keragaman suku, ras, aliran (agama), dan budaya (kultur). Dalam pendidikan multikultural, selalu muncul dua kata kunci, pluralitas, dan kultural. Sebab, pemahaman terhadap pluralita mencakup segala perbedaan dan keragaman. Sedangkan kultur itu sendiri tidak bisa terlepas dari empat tema yang penting aliran (agama), ras (etnis), suku dan budaya.

Ainurrafiq Dawam menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pengertian pendidikan multikultural yang demikian, tentu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri secara umum dipahami sebagai proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datangnya dan berbudaya apapun dia. Harapannya adalah terciptanya kedamaian yang sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan tanpa rekasa. Pendidikan semacam ini dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa. Sedangkan nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, hlm. 217-218

b. Tujuan Pendidikan Toleransi

Tujuan pendidikan pluralis-multikultural bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena ini adalah sesuatu yang *absurd* dan agak mengkhianati tradisi suatu agama. Yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. Setiap agama mempunyai sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang dibanggakan penganut agama, serta yang akan menjadikan mereka tetap bertahan, jika mereka mulai mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi riil, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungan atau kesalahan-kesalahan sejarah yang bisa dinilai dari sudut pandang sebagai sesuatu yang memalukan.

Oleh karena itu, suatu dialog dalam pendidikan pluralis-multikultural harus selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain yang hendak dibandingkan. Jelasnya, landasan filosofis pelaksanaan pendidikan pluralisme-multikulturalisme di Indonesia harus didasarkan kepada pemahaman adanya fenomena bahwa “satu Tuhan, banyak agama” merupakan fakta dan realitas yang dihadapi manusia sekarang. Maka manusia Indonesia sekarang harus didorong menuju kesadaran bahwa pluralis-multikultural memang merupakan fitrah manusia. Selain itu juga perlu didasarkan kepada pemahaman dan pengertian bahwa manusia memang berbeda. Tetapi mereka juga memiliki kesamaan-kesamaan. Setidaknya dalam

keadaan peradaban sekarang ini persamaan-persamaan mereka lebih penting ketimbang perbedaan-perbedaan di antara mereka.⁷¹

c. Kebijakan Pendidikan Toleransi di Negara Indonesia

Secara ideal, kebijaksanaan Indonesia mendatang terhadap pluralitas agama mestinya lebih meningkat dibandingkan pada masa kolonial. Secara teoritis, ada beragam bentuk politik kebijakan pendidikan agama yang dapat dipilih. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Saerozi, pola atau tipe kebijakan pendidikan agama yang tepat untuk konteks masyarakat Indonesia yang pluralis-multikultural adalah pola konfensional. Dalam arti bahwa negara memberi legimitasi pada pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan subyek didik pada agama masing-masing.⁷²

Pola yang sebaliknya adalah non-konfesional, yaitu negara memberi legimitasi pada pengenalan berbagai agama di sekolah. Pola ini menekankan pada tumbuhnya kesadaran tentang eksistensi berbagai kepercayaan yang diyakini oleh kelompok-kelompok di dalam masyarakat.

Pola kebijaksanaan konfensional tidak mengarahkan negara untuk mengharuskan KKM (Kelompok Keyakinan Minoritas) menggunakan keyakinan KKD (Kelompok Keyakinan Dominan). Tetapi justru sebaliknya, negara menciptakan kebijaksanaan agar penerimaan keyakinan dari tiap-tiap kelompok berada dalam posisi rendah, sehingga memberi

⁷¹ Syamsul Mu'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 94-95

⁷² M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme...*, hlm. 149

peluang tiap-tiap kelompok keyakinan untuk mengamalkan keyakinan masing-masing.⁷³

Di sisi lain, akses KKM pada kekuasaan dilakukan dengan model perangkulan (*enfold*), bukan pemisahan (*isolation*). Model perangkulan dipilih agar KKM tidak merasa dirintangi untuk memperoleh akses kekuasaan dalam hubungan sosial politik masyarakat. Penerapan model perangkulan (*enfold*) menghindarkan negara dari upaya-upaya domonasi maupun penerlantaran terhadap KKM. Di samping itu, model perangkulan juga dimaksudkan agar tidak ada kelompok yang merasa dipaksa untuk mengikuti agama tertentu dengan dalih akan diberikan akses kekuasaan.

Selanjutnya, pilihan kebijaksanaan pada “pluralisme agama konfensional” akan mengarahkan negara pada lima tindakan, yaitu (1) mengakui tiap-tiap kelompok keyakinan; (2) mendorong secara spesifik agar kelompok keyakinan mengamalkan nilai keimanan dan ketaqwaan; (3) membina tiap-tiap warga negara agar saling menghormati atas dasar dorongan keimanannya; (4) membuka pintu akses partisipasi bagi KKM dalam ranah kekuasaan; (5) memberdayakan kelompok keyakinan yang tertindas.⁷⁴

Kurikulum tersebut dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup

⁷³ Ibid, hlm. 150

⁷⁴ Ibid, hlm. 150-151

bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, di dalamnya menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.⁷⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran terhadap semua pemeluk agama. Untuk membentuk pendidikan yang menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran pluralis dan toleran diperlukan rekonstruksi pendidikan sosial keagamaan dalam pendidikan agama. Salah satunya dengan mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama lain.⁷⁶

Pendidikan dianggap sebagai instrumen penting. Sebab, “pendidikan” sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya. Hal tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa salah satu peran dan fungsi pendidikan agama di antaranya adalah untuk meningkatkan keberagaman

⁷⁵ Selviyanti Kaawoan, *Jurnal Pendidikan Islam: Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Perilaku Toleran Pada Warga Sekolah...*, hlm. 74

⁷⁶ Ngainun Naim dan Achmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 187

peserta didik dengan keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap agama lain. Dalam konteks ini, tentu saja pengajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah dituntut untuk selalu menanamkan nilai-nilai toleransi beragama.⁷⁷

Kritik utama terhadap pendidikan agama saat ini adalah kecenderungannya yang bersifat normatif. Mulai dari perumusan tujuan sampai dengan isi yang bersifat *melangit*, cenderung teosentris abstrak yang mengabaikan realitas. Sementara itu metodologi yang dipakai cenderung indoktrinatif. Model indoktrinatif cenderung menutup peluang bagi pendalaman yang komprehensif. Model ini cenderung menekan siswa untuk berpikir eksklusif, simplistic, dan tidak menghargai pluralitas.⁷⁸

Oleh karena itu seyogyanya arah pendidikan agama tidak hanya berorientasi *vertical*, tetapi juga berorientasi horizontal, bagaimana beriman dan taqwa yang berimbas pada perilaku sosial pada masyarakat. Semangat utama dari pendidikan agama yang demikian adalah agar terjadi dialektika antara aspek normative dan sosiologis, antara teks dan konteks, teks dan realitas. Selain itu pendidikan agama selama ini hanya mengacu pada moralitas individual, oleh karena itu sebaiknya ke depan juga dikembangkan pendidikan agama yang mengacu pada moralitas kolektif. Sebab kemelut bangsa ini berawal dari lemahnya moralitas kolektif.

⁷⁷ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 7

⁷⁸ Soemanto, et. al., (ed.), *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan...*, hlm.49-50

Pendidikan yang berjalan selama berasumsi mengenalkan nilai-nilai agama otomatis akan mengantarkan anak ke pengalaman keagamaan. Padahal ada jarak yang lebar antara mengenal nilai dengan pengalaman. Pendidikan yang hanya mengandalkan khotbah, nasehat, dan indoktrinasi tidak akan mampu melahirkan generasi yang memiliki moralitas kolektif dan watak kebangsaan. Selama ini pendidikan agama di lembaga-lembaga-lembaga formal terkesan lebih banyak mengarah pada semangat misionaris dan dakwah yang menegaskan *truth claim*, sehingga pendidikan agama belum mampu secara optimal memberikan kontribusi positif bagi terciptanya persaudaraan sejati, tetapi justru menciptakan jarak sosial antar peserta didik yang berbeda agama.⁷⁹

Inilah agenda dan program baru yang harus masuk dalam kalkulasi umat beragama, khususnya bagi para pendidik. Karena pendidik merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi keberagaman yang moderat dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidik mempunyai posisi penting dalam pendidikan multikultural karena dia merupakan satu target dari strategi pendidikan ini. Apabila seorang guru memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 50

⁸⁰ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: CrossKultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 61.

Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU RI No 20 Tahun 2003). Dari definisi pendidikan tersebut, dengan jelas terungkap bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang usaha sadar dan terencana, untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.

Insan pendidikan mulai dari guru, sebagai operator pendidikan, sampai dengan menteri, sebagai pejabat khusus penanggung jawab pendidikan, haruslah mengetahui dengan tepat apa yang menjadi landasan dalam perencanaan pendidikan Indonesia. Pengetahuan mengenai landasan pendidikan Indonesia oleh para guru, akan membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan ini karena guru di dalam kelas mengetahui untuk apa, mengapa, dan karena apa dia melakukan proses pendidikan di kelas.⁸¹

Amin Abdullah, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling

⁸¹ Sapendi, *Pendidikan Pluralisme Agama*, (Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies Volume 2 Nomor 2, 2012), hlm. 163 dikutip pada tanggal 06 Desember 2016 pukul 18.00 WIB

tinggi nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antarumat beragama. Padahal, guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menerjemahkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan masif. Karena itulah, tidak terlalu mengherankan jika berkecambahnya bentukbentuk radikalisme agama yang dipraktikkan sebagian umat menjadi ancaman serius bagi berlangsungnya pendidikan pluralisme yang menekankan pada adanya saling keterbukaan dan dialog.⁸²

Peran guru dalam hal ini meliputi : *pertama*, seorang guru harus mampu bersikap demokratis dalam segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, tidak diskriminatif terhadap murid-murid yang menganut agama yang berbeda dengannya. Sebagai salah satu contoh ketika seorang guru sejarah menerangkan tentang perang salib (1099-1291) Masehi yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen maka dia harus mampu untuk bersikap tidak memihak terhadap salah satu kelompok yang terlibat dalam perang tersebut. Meskipun agama yang dianutnya sama dengan salah satu yang terlibat dalam perang tersebut.

Kedua, guru seharusnya memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang berhubungan dengan agama. Contohnya, ketika terjadi pemboman yang dilakukan oleh para teroris

⁸² *Ibid*, hlm.167

maka guru yang memiliki wawasan multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. Kemudian sebaiknya seorang guru mampu menjelaskan bahwa kejadian tersebut seharusnya jangan sampai terjadi. Karena di dalam semua agama baik Islam, Katolik, Budha, Hindu, Yahudi, Konghucu, dan kepercayaan lainnya jelas dikatakan bahwa segala macam bentuk kekerasan dalam memecahkan masalah adalah dilarang. Dialog dan musyawarah adalah cara-cara penyelesaian segala bentuk masalah yang sangat dianjurkan oleh semua agama dan kepercayaan yang ada.⁸³

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi keberagaman yang moderat dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidik mempunyai posisi penting dalam pendidikan multi kultural karena dia merupakan satu target dari strategi pendidikan ini. Apabila seorang guru memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah.⁸⁴

Seperti yang dikatakan oleh Mahfud dalam bukunya yang dikutip oleh Sapendi dalam jurnalnya. Saling menghargai dan berkomitmen untuk membangun bangsa yang modern, yang di dalamnya terdapat banyak agama dan etnis. Pluralisme adalah simbol bagi suksesnya kehidupan

⁸³ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural....*, hlm. 61-62

⁸⁴ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*. hlm. 61.

masyarakat majemuk. Karena itu, kurikulum haruslah dirancang sebaik mungkin untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti pentingnya pluralisme dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sapendi menyebutnya kurikulum berbasis pluralisme.

Untuk menghadapi realitas dunia yang plural ini, umat beragama pun dituntut untuk mampu menempatkan diri dan memahami konteks pluralisme yang dilandasi semangat saling menghormati dan menghargai keberadaan umat beragama lain. Karena itu, ada beberapa pengertian pluralisme yang perlu dipahami oleh masing-masing umat beragama. Pertama, pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan.

Dalam jurnalnya Sapendi mengutip dari Tilaar juga menyebutkan bahwa “keterlibatan aktif” terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.⁸⁵

Proses pendidikan tentunya tidak terjadi dalam kehampaan dan situasi yang terisolasi. Ia selalu tidak dapat dilepaskan dari keadaan

⁸⁵ Sapendi, *Pendidikan Pluralisme Agama....*, hlm. 167-168

sekeliling, di mana anak berada. Dengan kata lain, proses pendidikan yang dilakukan selalu berada dalam suatu lingkungan. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Ibrahim Nashir, yang mengatakan bahwa *pendidikan merupakan proses penyesuaian antara seseorang dengan lingkungan di mana ia hidup, baik lingkungan alam maupun sosial*. Proses tersebut terjadi sepanjang hidup, tanpa ada batas akhirnya. Dalam pengertian ini, proses pendidikan atau perubahan perilaku seseorang tidak akan pernah terjadi tanpa adanya lingkungan.

Sarhan menyatakan dalam bukunya, yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar seseorang yang mempengaruhi dan berinteraksi dengannya. Pengertian tersebut memberikan petunjuk bahwa lingkungan berfungsi untuk memberikan fasilitas bagi perubahan perilaku anak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang dianutnya. Dengan kata lain, perubahan perilaku anak dalam proses pendidikan merupakan hasil dari adanya interaksi antara anak dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungan tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar anak yang sedang mengalami proses pendidikan. Lingkungan tersebut tidak hanya memfasilitasi proses pendidikan.

Tetapi juga merupakan bagian dari proses tersebut karena juga berinteraksi dengan anak. Seperti yang diungkapkan oleh Said,

lingkungan pendidikan juga mempengaruhi dan menentukan proses pendidikan yang dialami oleh anak dan konsekuensinya juga akan tercermin dalam hasil proses tersebut. Lebih lanjut, karena apa yang berada di sekitar anak sangat beragam, maka lingkungan pendidikan juga beragam. Namun demikian, secara garis besar lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: alam, sosial, dan kebudayaan.

Meskipun ketiga lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang terpenting karena interaksinya dengan anak bersifat aktif. Hal ini terjadi terutama dalam kaitannya dengan hubungan antar individu maupun dengan kelompok. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang tersebut di antaranya dipengaruhi oleh: lamanya, frekuensi, dan kekuatan lingkungan, jenis, derajat makna, iklim kerjanya, serta sikap kritis orang yang bersangkutan terhadap lingkungannya. Dengan demikian, dengan bervariasinya lingkungan pendidikan, maka bervariasi pula pengaruhnya terhadap seseorang dalam perkembangan hubungannya dengan kelompok lain.⁸⁶

Praktik ibadah dan perayaan keagamaan di sekolah, sistem pendidikan agama di Indonesia mendorong pihak sekolah (swasta/negeri) secara institusional untuk menyelenggarakan acara/ upacara keagamaan sesuai dengan agama yang dipeluk oleh tiap-tiap warga sekolah. Ritual yang dilakukan oleh siswa beragama Islam berbeda dari ritual siswa beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budaha. Di samping

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 169

itu, ada pula ragam ritual yang berbeda dari sekolah-sekolah tertentu, sebagai cerminan dari identitas dan orientasi keagamaan masing-masing. Di antara sekolah-sekolah yang berada di bawah ‘panji Islam’, misalnya, terdapat *kaiyyah* ritual yang beragam meskipun bentuk tujuannya sama. Ragam ritual tampaknya terjadi pula di sekolah Kristen dan Katolik akibat perspektif, meskipun keduanya mempunyai dasar pedoman yang sama.

Karena adanya tuntutan orientasi akademis yang plural, sekolah-sekolah negeri Indonesia bersikap akomodatif terhadap ragam ritual para siswa sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. Misalnya, pihak sekolah cukup memberikan aba-aba atau perintah ‘mengheningkan cipta’ guna mengarahkan kegiatan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Perintah seperti ini di temui pada upacara peringatan hari besar besar nasional atau upacara lain di sekolah, dan juga pada doa-doa bersama yang dilakukan di dalam kelas.⁸⁷

Buku-buku teks pendidikan agama juga menyajikan tuntunan ritual yang beragam, meskipun masih dalam kerangka satu agama. Misalnya, buku pendidikan agama Islam yang disahkan oleh Departemen Agama, memberi tuntunan bacaan-bacaan shalat dalam berbagai ragam, dan masing-masing ragam dinilai sah sebagai tuntutan yang benar. Ragam tuntunan shalat itu lebih dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap siswa sesuai ragam latar belakang paham keagamaan masing-masing. Hal yang sama diberlakukan pula pada pendidikan agama lain. Peringatan hari besar

⁸⁷ M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme...*, hlm. 41-42

agama, seperti Maulid Nabi Muhammad, *Isra' Mi'raj*, dan 1 *Muharram*, dilakukan oleh para guru dan siswa yang beragama Islam. *Shalat 'Idul Fitri* dan *'Idul Adha* sebagai bentuk ibadah monumental, sering pula dilaksanakan di sekolah. Di sekolah negeri, siswa-siswa beragama Kristen sering pula melakukan perayaan hari besar agamanya secara bersama di gereja atau di ruang kelas.⁸⁸

Kegagalan pendidikan agama selama ini di sebabkan paling tidak oleh empat faktor: *pertama* penekanan pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; *kedua* sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai “hiasan kurikulum” “belaka” atau “pelengkap” yang dipandang sebelah mata; *ketiga* kurangnya penekanan pada penanaman, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi; dan *keempatnya* kurangnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain.

Pendidikan agama akan dapat memenuhi fungsinya dan sekaligus dapat memberikan sumbangan untuk menumbuhkan sikap yang menghargai pluralisme dan pluralitas apabila, *pertama* mampu melakukan transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; *kedua* mampu menjadikan pendidikan agama sebagai suatu program pendidikan nasional kita; *ketiga* mampu menanam nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama, seperti nilai-nilai yang disebut di atas; dan *keempat*

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 42-43

memberikan perhatian yang memadai untuk mempelajari agama-agama lain.⁸⁹

B. Penelitian Terdahulu

Bahasan ini ditekankan pada penelusuran karya-karya dan penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 23 Semarang Tahun 2011/2012” oleh Lina Riqotul Wafiyah (083111079) pada tahun 2012. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran PAI, model pengajaran dalam proses penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran PAI, dan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 23 Semarang. Perbedaan dengan skripsi yang saya kerjakan yaitu:

Pertama objek yang saya teliti tidak hanya terfokus dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam saja tetapi lebih dalam proses pendidikan toleransi di sekolah; *Kedua* waktu dan lokasi penelitian tidak sama; *Ketiga* Kajian teori yang digunakan tidak sama skripsi Lina terfokus dalam penanaman nilai-nilai toleransi

⁸⁹ Kautsar Azhari Noer, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia...*, hlm. 233

beragama dalam pembelajaran PAI , sedangkan skripsi saya kajian teori yang saya gunakan adalah Pendidikan Toleransi Umat Beragama jadi terfokus pada pendidikan toleransi di sekolah.

2. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel” oleh Arief Yulianto (11110037) pada tahun 2015. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa toleransi di Dusun Margosari pada kategori yang tinggi, perkembangan Islam di dusun Margosari pada kategori yang tinggi, dan ada pengaruh yang signifikan antara toleransi antar umat beragama dengan perkembangan Islam di dusun Margosari desa Ngadirojo kecamatan Ampel. Perbedaan skripsi saya dengan skripsi milik Arief Yulianto yaitu terletak pada: *Pertama* lapangan penelitian Arief terdapat pada Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel sedangkan lapangan penelitian saya terdapat pada Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Ngunut Tulungagung; *Kedua* metode penelitian Arief menggunakan penelitian Kuantitatif, sedangkan skripsi saya menggunakan penelitian Kuantitatif; *Ketiga* fokus penelitian Arief yaitu Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel, sedangkan penelitian saya terfokus kepada Pendidikan Toleransi Umat Beragama di SMAN 01 Ngunut.

3. Jurnal pendidikan yang berjudul “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)” oleh Rini Fidiyani pada tahun 2013. Pada jurnal ini terdapat Ada tiga permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, berkaitan dengan penggalian nilai-nilai lokal (kearifan lokal) yang ada di Komunitas Aboge yang mendukung terciptanya keharmonisan kehidupan beragama; *kedua*, mengenai pandangan sesepuh atau pemuka agama dalam Komunitas Aboge yang mengenai keharmonisan dan toleransi kehidupan beragama berdasarkan pendekatan teologi; dan *ketiga*, mengenai perlindungan hukum terhadap Komunitas Aboge beserta kearifan lokal oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan penelitian Rini Fidiyani dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada: *Pertama* penelitian disajikan dalam bentuk jurnal, sedangkan penelitian saya disajikan dalam bentuk skripsi, *Kedua* penelitian Rini terfokus pada tiga permasalahan Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas , sedangkan penelitian saya hanya terfokus pada pendidikan toleransi di sekolah; *Ketiga* obyek yang diteliti berbeda Rini melakukan penelitian pada masyarakat Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas,

sedangkan penelitian saya mengambil obyek pendidikan toleransi di sekolah tidak didalam masyarakat luas.

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Aspek Perbedaan		
			Fokus	Kajian Teori	Pengecekan Keabsahan Data
1	Lina Riqotul Wafiyah	Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 23 Semarang Tahun 2011/2012	1) penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran PAI. 2) model pengajaran dalam proses penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran PAI. 3) faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 23 Semarang	1) Kajian tentang Toleransi beragama dalam Pandangan Islam. 2) Kajian tentang Toleransi Bergama di Sekolah 3) Kajian tentang Model Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran PAI di Sekolah	1) Perpanjangan keikut sertaan 2) Ketekunan pengamatan 3) Triangulasi 4) Pengecekan teman sejawat 5) Pengecekan kecakupan referensi

2	Arief Yulianto	Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana toleransi antar umat beragama di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel? 2) Bagaimana perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel? 3) Apakah terdapat pengaruh antara toleransi antar umat beragama terhadap perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian tentang Toleransi Antar Umat Beragama 2) Perkembangan Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Validitas dan Reabilitas instrumen 2) Pengujian Validitas dan reabilitas instrumen 3) Pengujian Hipotesis
3	Rini Fidiyani	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di	1) Berkaitan dengan penggalan nilai-nilai lokal (kearifan lokal) yang ada di Komunitas Aboge yang mendukung terciptanya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Aboge sebagai Bentuk Akulturasi Agama dan Budaya 2) Kajian tentang Kearifan Lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perpanjangan pengamatan 2) Ketekunan pengamatan 3) Triangulasi 4) Pengecekan teman sejawat

		Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)	<p>keharmonisan kehidupan beragama;</p> <p>2) Mengenai pandangan sesepuh atau pemuka agama dalam Komunitas Aboge yang mengenai keharmonisan dan toleransi kehidupan beragama berdasarkan pendekatan teologi; dan</p> <p>3) Mengenai perlindungan hukum terhadap Komunitas Aboge beserta kearifan lokal oleh pihak-pihak terkait.</p>	<p>Komunitas Aboge yang Mendukung Terciptanya Keharmonisan Kehidupan Beragama</p> <p>3) Kajian tentang Pandangan Sesepuh atau Pemuka Agama dalam Komunitas Aboge Mengenai Keharmonisan dan Toleransi Kehidupan Beragama</p> <p>4) Kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap Komunitas Aboge beserta Kearifan Lokal</p>	
4	Penelitian ini	Pendidikan Toleransi Umat Beragama di SMA Negeri 01 Ngunut	<p>1. Bagaimana potret keberagamaan di SMAN 1 Ngunut?</p> <p>2. Bagaimana implementasi pendidikan toleransi agama di SMAN 1 Ngunut?</p> <p>3. Apa faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan</p>	<p>1) Pengertian Toleransi dalam Agama Islam</p> <p>2) Pendidikan Toleransi</p>	<p>1) Ketekunan pengamatan</p> <p>2) Triangulasi</p> <p>3) Pengecekan teman sejawat</p>

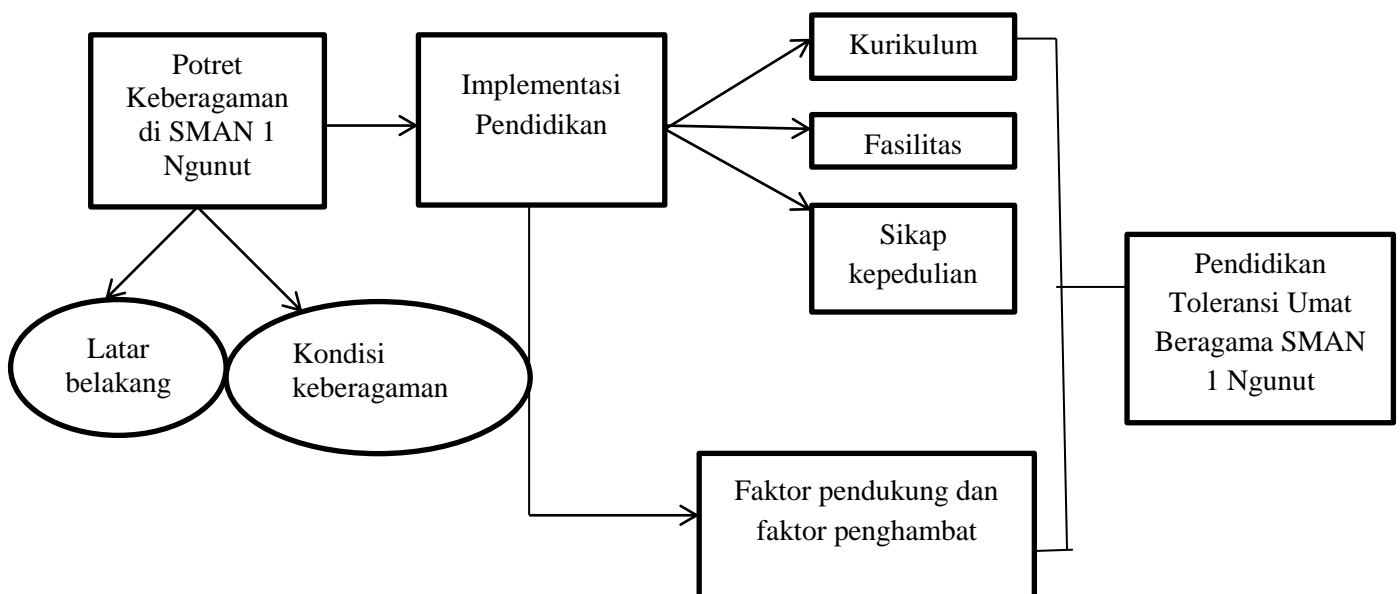
			toleransi agama di SMAN Ngunut?		
--	--	--	---	--	--

C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁹⁰

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian



⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 43